

Perkembangan dan Tantangan Transformasi PTAI (IAIN menjadi UIN)

Ahmad Faisal Hadziq

STAI La Tansa Mashiro Indonesia

Article Info

Abstract

Keywords:

*Development,
Challenges
PTAIN
Transformation*

Based on the foregoing, it can be seen that the background of the establishment of PTAIN is the attention of Muslims towards Islamic religious education growing when they learned that the Dutch came to Indonesia with the purpose of the gospel, and also in order to meet the needs of Islamic religious teachers in Indonesia. The Islamic High School (STI) was established and officially opened on July 8, 1945. Then on March 10, 1948 the STI was changed to the Islamic University of Indonesia with four faculties namely: the Faculty. Religion, Fac. Law, Faculty. Economics and Faculty. Education. Then PTAIN was established in Yogyakarta in September 1951 based on government regulation no. 34 of 1950, signed by the President of the Republic of Indonesia. Since it was first established up to now the Islamic High School has undergone many changes and also developments, which this development makes the Islamic College or Islamic College for the better and has a place in the hearts of the people of Indonesia. Until now, the number of Islamic Universities throughout Indonesia is very

large. Some are in the form of Tarbiyah Islamic High School (STIT), State Islamic High School (STAIN), State Islamic Religion Institute (IAIN), UIN (State Islamic University) and also private high schools. In the long history of its development, PTAI has gained wide space so that its students and alumni have a plus, because the religious authority in their hands can be grounded using language that is widely understood by the public, so PTAI students and alumni can become political observers, politicians, print and electronic journalists, NGO activists, bankers, advocates, among others. The development of the world of Islamic higher education with the change of several IAINs into UINs, as well as the opening of general study programs at IAIN, raised new hopes for the emergence of a paradigmatic alternative to the development of social science in Indonesia. The great discourse of the integration of religion and science soon emerged as a central theme for the development of social science at IAIN / UIN

Corresponding

Author:

Ahmadfaisalhadziq@gmail.com

Latar belakang didirikannya PTAIN ialah Perhatian umat Islam terhadap pendidikan agama Islam semakin tumbuh ketika mengetahui bahwasannya Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan gospel, dan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan guru agama Islam di Indonesia. Sekolah Tinggi Islam (STI) didirikan dan dibuka secara resmi pada tanggal 8 Juli 1945. Lalu pada tanggal 10 Maret 1948 STI dirubah menjadi Universitas Islam Indonesia dengan empat fakultas yaitu: Fak. Agama, Fak. Hukum, Fak. Ekonomi dan Fak. Pendidikan. Kemudian PTAIN didirikan di Yogyakarta pada bulan september 1951 yang berdasarkan

pada peraturan pemerintah No. 34 Tahun 1950, yang ditandatangani oleh Presiden RI. Sejak pertama didirikan hingga saat ini Sekolah Tinggi Islam telah mengalami banyak perubahan dan juga perkembangan, yang mana perkembangan ini menjadikan Sekolah Tinggi Islam atau Perguruan Tinggi Islam menjadi lebih baik dan mendapat tempat di dalam hati masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, jumlah Perguruan Tinggi Islam diseluruh Indonesia sangat banyak. Ada yang berbentuk Sekolah Tinggi Islam Tarbiyah (STIT), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), UIN (Universitas Islam Negeri) dan juga sekolah tinggi swasta. Dalam sejarah perkembangannya yang begitu panjang PTAI kemudian mendapat ruang gerak yang luas sehingga mahasiswa dan alumninya memiliki nilai plus, karena otoritas keagamaan yang ada ditangannya bisa dibumikan dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh publik secara luas, sehingga mahasiswa dan alumni PTAI bisa menjadi pengamat politik, politisi, wartawan cetak dan elektronik, aktivis LSM, bankir, advokat dan lain sebagainya. Perkembangan dunia pendidikan tinggi Islam dengan perubahan beberapa IAIN menjadi UIN, juga dibukanya prodi-prodi umum di IAIN, memunculkan harapan baru bagi munculnya alternatif paradigmatis pengembangan ilmu sosial di Indonesia. Wacana besar integrasi agama dan ilmu pengetahuan segera muncul sebagai tema sentral pengembangan ilmu sosial di IAIN/UIN

Kata Kunci : *Perkembangan, Tantangan Transformasi PTAIN.*

Pendahuluan

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) baik sekolah tinggi, institut maupun universitas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Karena itu Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) secara keseluruhan juga tidak bisa mengisolasi diri dari perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan pendidikan tinggi/Perguruan Tinggi nasional, dan bahkan internasional. Sebab kalau tidak, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) akan ditinggalkan oleh masyarakat karena tidak *akomodatif* terhadap perubahan dan cepat menjadi usang.

Semua krisis ini tidak hanya menimbulkan keprihatinan mendalam dari kalangan masyarakat akademik, tetapi juga merata pada semua lapisan masyarakat dengan berbagai ragam latar belakang pendidikan, profesi dan tingkat kesejahteraan. Namun yang tidak kalah penting dari semua itu adalah semakin merosotnya efektivitas dan efisiensi Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dalam menghasilkan mahasiswa dan lulusan yang memiliki kompetensi yang siap pakai, memiliki daya saing yang handal dan tangguh dalam zaman

globalisasi yang penuh dengan tantangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah dikemukakan suatu rumusan masalah yaitu: Bagaimana perkembangan dan tantangan yang dihadapi Perguruan Tinggi Islam di era globalisasi saat ini?

Metode Penelitian

Metode penelitian dan pengumpulan data dalam makalah ini dilakukan dengan sistem kualitatif. Cara pengumpulan data dalam metode ini adalah menghimpun dan memanfaatkan media yang ada seperti media cetak, media elektronik, media sosial dan lain sebagainya.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar kepada dunia pendidikan, terutama setelah Indonesia merdeka. Hal ini dibuktikan dengan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan sampai ke pelosok negeri. Pendidikan Islam juga tidak terlepas dari perhatian pemerintah tersebut yaitu dengan mendirikan dan memberikan bantuan kepada madrasah-madrasah dan pesantren-pesantren, sehingga lembaga-lembaga tersebut dapat melaksanakan pendidikan dan pengajaran kepada

peserta didik dengan baik. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang besar dan terampil, sesuai dengan semangat mamajukan pendidikan di Indonesia, maka didirikanlah perguruan-Perguruan Tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan guru agama Islam, pada tahun 1950 departemen agama telah mendirikan Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Lulusan sekolah ini dipersiapkan sebagai guru agama di sekolah dasar baik sekolah umum maupun sekolah dasar Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga ahli pendidikan agama dan urusan agama dilingkungan departemen agama, didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta sebagaimana dituangkan dalam penetapan Menteri Agama No. 1 tahun 1957. ADIA terdiri dari dua jurusan yaitu jurusan pendidikan agama dan jurusan sastra. Lama studi di ADIA ini adalah lima tahun yang dibagi menjadi dua tingkatan yaitu tingkat semi akademi selama 3 tahun, sedangkan tingkat kedua adalah akademi yang ditempuh selama 2 tahun.

Dalam Perguruan Tinggi Islam membutuhkan tenaga pendidik yang profesional dan mumpuni dibidangnya, maka dibutuhkan tenaga pendidik tersebut demi tercapainya pendidikan

yang berdaya dan relevan. Tenaga pendidik tersebut dibutuhkan Perguruan Tinggi Islam negeri maupun swasta baik kualitas maupun kuantitasnya. Pembinaan tenaga *edukatif* yang profesional dan memenuhi syarat kualitatif dilakukan dengan mendorong dan membiayai mereka untuk mengikuti program pendidikan pasca sarjana baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Berkaitan dengan upaya membentuk tenaga pendidik di Perguruan Tinggi Islam yang berkualitas. Maka Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, H.S. Timur Djaelani, mengeluarkan surat keputusan nomor Kep/E/422/1981 tertanggal 13 Agustus 1981 dan menunjuk IAIN Jakarta untuk melaksanakan dan membuka program pasca sarjana. Akhirnya pada tanggal 25 Agustus 1982, menteri agama menerbitkan surat keputusan nomor 78 tahun 1982, tentang pembukaan fakultas pasca sarjana pada IAIN Syarif Hidayatullah (yang sekarang berubah menjadi UIN) dengan mengangkat Prof. Dr. Harun Nasution sebagai dekan.

Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagai lembaga pendidikan tinggi merupakan bagian penting dari pembangunan nasional, mengemban misi yang diemban oleh tugas pembangunan. Maka karena itu

tanggung jawab PTAI bagaimana mengorganisir dan mengembangkan sumber daya manusia melalui proses pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Perubahan IAIN ke UIN menandakan sebuah proses kesadaran yang lebih maju. Ini merupakan bagian dari usaha mengintegrasikan beragam keilmuan untuk mengeliminasi dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Hal ini dianggap perlu dalam usaha untuk memberikan dasar etika Islam demi pengembangan ilmu dan teknologi dan pada saat yang bersamaan juga berusaha mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam secara profesional di dalam kehidupan sosial. Perubahan IAIN menjadi UIN merupakan hasil dan usaha para sarjana Muslim yang lama dan melelahkan.

Landasan Teori

Perguruan Tinggi Islam yang pertama kali berdiri berada di daerah Padang Sumatera Barat. Perguruan Tinggi Islam ini berdiri pada tanggal 09 Desember 1940, yang mana berdirinya Perguruan Tinggi Islam ini dipelopori oleh Persatuan Guru-guru Agama Islam yang dipimpin oleh Mahmud Yunus.

Lalu pada kongres MIAI II (Majelis Islam A'la Indonesia) yang diadakan di Solo pada tanggal 2-7 Mei 1939 dan dihadiri oleh 25 organisasi Islam. Pada kongres tersebut dihasilkan dukungan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Islam. Lalu pada bulan Juni 1938, M. Natsir menulis artikel mengenai pentingnya Sekolah Tinggi Islam yang bisa menghasilkan kelompok intelektual yang memiliki basas pegetahuan Islam dan kebudayaan yang kuat sebagai alternatif pendidikan ala Barat.

Maka Masyumi (Majelis Syura Muslim Indonesia) yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi Islam memelopori mendirikan Perguruan Tinggi Islam, sebagai tindak lanjut dari artikel M. Natsir. Kemudian pada bulan April 1945 diadakan rapat dengan sejumlah tokoh besar yang antara lain:

1. PBNU dihadiri oleh KH Abdul Wahab, KH. Bisri Syamsuri, KH. Wahid Hasyim, KH. Masykur, dan Zainal Arifin.
2. PB Muhammadiyah di hadiri oleh Ki Bagus Hadikusuma, KH. Farid Ma'rif KH. Mas Mansur, dan lain-lain

3. PB POI dihadiri oleh KH A. Halim dan H. Mansur
4. PB PUII dihadiri oleh A. Sanusi dan Sumoatmojo.
5. PB AI Islam dihadiri oleh KH. Imam Ghazali
6. Shumubu dihadiri oleh A. Kahar Muzakar, KH. A. Moh Adnan, KH. Imam Zarkasi
7. Cendekiawan intelektual dihadiri oleh Dr. Sukiman Wirdjosadojo, Muh Ruum, dan lain-lain.

Pada sidang tersebut diputuskan untuk membentuk panitia perencana Sekolah Tinggi Islam yang dipimpin oleh Mohammad Hatta dan sekretarisnya Muhammad Natsir. Lalu dengan bantuan dari pemerintah pendudukan Jepang STI didirikan dan di buka secara resmi pada tanggal 8 Juli 1945.

STI ikut pemerintah pusat Republik Indonesia hijrah ke Yogyakarta dan pada tanggal 10 April 1946 STI dibuka kembali. Kemudian pada November 1947 dibentuk panitia perbaikan STI. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan jangkauan STI. Hasil sidang memutuskan untuk mendirikan Universitas Islam Indonesia pada tanggal 10 Maret 1948 dengan empat fakultas yaitu: Fak. Agama, Fak. Hukum, Fak. Ekonomi dan Fak. Pendidikan.

Selanjutnya didirikan PTAIN di Yogyakarta pada bulan September 1951 yang berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 34 Tahun 1950, yang ditandatangani oleh Presiden RI. Yang mana dalam pasal 2 pada peraturan tersebut dinyatakan bahwa PTAIN dimaksudkan untuk memberi pelajaran tinggi dan menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam.

Pada bulan Juni 1957 di Jakarta dibuka Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) oleh Departemen Agama berdasarkan penetapan Menteri Agama No.1 Tahun 1957. Tujuan didirikannya ADIA ini adalah untuk mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri, untuk menjadi guru agama pada sekolah lanjutan atas atau menjadi petugas dibidang pendidikan di lingkungan Departemen Agama.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwasannya PTAIN yang pertama bernama IAIN dan berdiri pada tahun 1951 dan diresmikan secara langsung oleh Presiden RI, lalu pada tahun 1957 didirikan pula ADIA, yang mana kedua lembaga pendidikan ini didirikan dengan tujuan untuk meluluskan siswa yang mahir dalam bidang agama Islam, sehingga para lulusannya bisa menjadi tenaga pendidik agama Islam dilembaga-lembaga

pendidikan lainnya, dan juga bisa menjadi tenaga petugas pada bidang pendidikan di Departemen Agama. Pada bulan Mei 1960 Departemen Agama menggabungkan PTAIN dan ADIA menjadi IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah.

Gagasan mendirikan Sekolah Tinggi Islam telah muncul pada tahun 1938 oleh Dr. Satiman melalui majalah PM No. 15. Kemudian ide tersebut diusung oleh majalah AID No. 128 tertanggal 12 Mei 1938 dengan menyiarkan bahwa telah diadakan musyawarah antara tiga badan pendiri Sekolah Tinggi di Jakarta, Solo dan Surabaya. Akibat penjajahan Jepang, gagasan ini juga tidak dapat direalisasikan. Baru pada tahun 1945 STI dapat didirikan atas inisiatif beberapa pemimpin Islam yang tergabung dalam satu yayasan yang diketuai oleh Muhammad Hatta dan sekretarisnya Muhammad Natsir. Sedangkan STI tersebut diketuai oleh K.H. Kahar Muzakir. Ketika terjadi perang kemerdekaan STI dipindahkan ke Yogyakarta tepatnya pada tanggal 22 Maret 1945. Namun tiga tahun berikutnya tepatnya pada tanggal 22 Maret 1948 STI di Yogyakarta ini berubah bentuk menjadi Universitas

Islam Indonesia (UII) dengan empat fakultas yaitu Fakultas Agama, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Paedagogik (Pendidikan).

Pada tanggal 9 Mei 1960 Departemen Agama Menggabungkan PTAIN dan ADIA, kemudian menerbitkan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 1960 yang melebur PTAIN Yogyakarta dan ADIA Jakarta menjadi "AL-JAMI'AH ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH" atau "INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)" yang berkedudukan di Yogyakarta dengan Rektor Prof. Mr. RHA. Soenarjo, yang kemudian diberi nama IAIN Sunan Kalijaga. Akhirnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960. Latar belakang penggabungan tersebut menurut A. Hasjmy adalah keinginan untuk mendirikan kampus Darussalam di Aceh sebagai upaya untuk pemulihan keamanan yang diakibatkan karena pemberontakan DI/TII dibawah pimpinan Daud Beureueeh, mantan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada zaman revolusi. Gubernur Aceh mengemukakan usul kepada Presiden Sukarno agar dibangun Perguruan Tinggi Islam Negeri dan Perguruan Tinggi Umum di dalam

kampus Darussalam dengan alasan pemulihan keamanan. Usul tersebut mendapat persetujuan oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian sebagai realisasi usulan tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama berunding dengan Gubernur Aceh yang menghasilkan persetujuan bahwa di dalam kampus Darussalam akan didirikan Fakultas Agama Islam Negeri.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan meminta agar fakultas tersebut dibawah naungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian juga Departemen Agama menginginkan bahwa Fakultas tersebut berada dalam naungan Departemen Agama. Pada akhir September 1959 Gubernur Aceh pergi ke Jakarta, waktu itu Departemen P dan K mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Kehewanan di Darussalam. Pada saat yang sama Menteri Agama juga mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Fakultas Agama Islam Negeri. Setelah surat keputusan Menteri Agama yang tertanggal September 1959 No. 48 tersiar tembusannya ke berbagai departemen dan instansi, Menteri P dan K melakukan protes kepada Menteri Agama yang pada saat itu dijabat oleh

K. Wahib Wahab dengan alasan bahwa menurut konsensus yang telah disepakati, bahwa hanya Departemen P dan K saja yang boleh mengelola Universitas dengan fakultas-fakultasnya. Sedangkan Departemen Agama hanya mengelola Akademi Dinas. Selanjutnya diadakannya beberapa perundingan yang khusus membahas perdebatan tersebut antara Prof. DR. Priyono sebagai Menteri P dan K dengan K. Wahib Wahab sebagai Menteri Agama. Akhirnya perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Departemen Agama boleh mendirikan Perguruan Tinggi Agama Islam asalkan tidak dinamai Universitas, maka didirikanlah IAIN dengan melebur PTAIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta, menjadi IAIN yang berkedudukan di Yogyakarta dan Jakarta sebagai cabangnya.

Berhubungan dengan itu, Fakultas Agama Islam Negeri yang ditetapkan dengan SK Menteri Agama No. 48 September 1959, dirubah menjadi Fakultas Syariah di Banda Aceh (cabang dari IAIN Yogyakarta) berdasarkan SK Menteri Agama tertanggal 2 Agustus 1960 No. 40 tahun 1960. Setelah berjalan selama dua tahun, IAIN mengalami perkembangan yang cepat. Di daerah-daerah dibuka fakultas-fakultas sebagai cabang dari IAIN

induk. Banyak IAIN di daerah-daerah sedang jarak dan luasnya wilayah antar daerah menimbulkan kesulitan dalam pengaturannya. Akhirnya, pada tahun 1963, Departemen Agama menganggap perlu untuk memisahkan IAIN menjadi dua institut berbeda yang masing-masing berdiri sendiri, yaitu IAIN Yogyakarta dengan Rektor Prof. R.H. Sunaryo dan IAIN Jakarta dengan Rektor Prof. H. Soenardjo. Pemisahan ini diatur melalui keputusan Menteri Agama No. 49 tahun 1963 tertanggal 25 Pebruari.

Sesuai dengan Keputusan Presiden RI. No. 11 tahun 1997, tertanggal 21 Maret 1997, tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) yaitu dengan alasan peningkatan efisiensi, efektifitas dan kualitas pendidikan di IAIN, dilakukan penataan terhadap fakultas-fakultas di lingkungan IAIN yang berlokasi di luar induk. Maka, sejak tanggal 1 Juli 1997 diresmikan berdirinya STAIN (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) sejumlah 33 buah diseluruh Indonesia. STAIN ini adalah berasal dari fakultas-fakultas IAIN yang ada di daerah-daerah yang terpisah lokasinya dari IAIN induknya. STAIN ini berdiri untuk menyahtui peraturan yuridis yang berkenaan

dengan pendidikan tinggi serta untuk lebih menyahtui perkembangan zaman. STAIN yang berdiri tersebut antara lain:

1. STAIN Ponorogo
2. STAIN Jember
3. STAIN Kediri
4. STAIN Malang
5. STAIN Pamekasan
6. STAIN Mataram
7. STAIN Tulungagung
8. STAIN Salatiga
9. STAIN Gorontalo
10. STAIN Palopo
11. STAIN Serang Jawa Barat
12. STAIN Ternate
13. STAIN Bengkulu
14. STAIN Surakarta
15. STAIN Batu Sangkar Sumatera Barat
16. STAIN Kerinci
17. STAIN Bukittinggi
18. STAIN Pekalongan
19. STAIN Pontianak
20. STAIN Pare-Pare
21. STAIN Curup
22. STAIN Manado
23. STAIN Watampone
24. STAIN Kudus
25. STAIN Palangkaraya
26. STAIN Cirebon
27. STAIN Kendari
28. STAIN Samarinda

29. STAIN Pontianak
30. STAIN Jurai Siwo
31. STAIN Ambon
32. STAIN
33. STAIN.

Selanjutnya, STAIN Malang berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan (UIIS), kemudian berubah lagi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang sampai sekarang. Sedangkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Meskipun pertumbuhan Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN) yaitu IAIN, UIN dan STAIN berkembang semakin pesat, Perguruan Tinggi swasta pun tumbuh subur di Indonesia. Umat Islam optimis mendirikan Perguruan Tinggi Islam swasta dan tidak menjadikan perkembangan Perguruan Tinggi Islam negeri di daerah-daerah yang berkembang pesat sebagai hambatan.

Berdirinya Perguruan Tinggi Islam swasta dimaksudkan untuk membendung paham komunisme, atheisme yang berkembang sekitar tahun 60-an, demi kepentingan syari'ah dan dakwah, serta untuk menampung mereka yang tidak lolos seleksi di Perguruan Tinggi Islam negeri. Fakultas-fakultas agama yang ada pada mulanya hanya berstatus "terdaftar" dari Direktorat Perguruan Tinggi Agama

Departemen Agama, kemudian meningkat menjadi berstatus "Diakui" sehingga sekitar pada tahun 1972 terdapat sekitar 110 Fakultas agama yang berinduk pada 81 Perguruan Tinggi Islam negeri. Disamping itu terdapat pula Perguruan Tinggi Islam, seperti UII (Universitas Islam Indonesia), UM (Universitas Muhammadiyah), dan UNISBA (Universitas Islam Bandung), dan UNISMA (Universitas Islam Malang), serta USU (Universitas Islam Sumatera Utara).

Universitas tersebut diatas memiliki fakultas agama yang berada dalam naungan dan tanggung jawab Direktorat Perguruan Tinggi Agama (PTA), kemudian dilimpahkan kepada IAIN setelah terbentuk KOPERTAIS (Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta) yang diketuai oleh Rektor IAIN di wilayah masing-masing. Sedangkan fakultas selain fakultas agama berada dibawah tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang sekarang adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti).

Kenyataan bahwa dalam Perguruan Tinggi Islam membutuhkan tenaga pendidik yang profesional dan mumpuni dibidangnya, maka dibutuhkan tenaga pendidik tersebut

demikian tercapainya pendidikan yang berdaya dan relevan. Tenaga pendidik tersebut dibutuhkan Perguruan Tinggi Islam negeri maupun swasta baik kualitas maupun kuantitasnya. Pembinaan tenaga edukatif yang profesional dan memenuhi syarat kualitatif dilakukan dengan mendorong dan membiayai mereka untuk mengikuti program pendidikan pasca sarjana baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pembahasan/Hasil Penelitian

Mengiringi perjalanan IAIN, sejak tahun pertama berdirinya (1960) hingga usianya yang kurang lebih 60 tahun sekarang. IAIN tidak pernah luput dari otokritik dari civitas Akademikannya sendiri, akan tetapi semua itu tidak semata-mata untuk menjatuhkan martabat IAIN, tetapi untuk kebaikan dan kemajuan IAIN. Banyak pandangan terhadap IAIN terhadap akses yang sangat terbatas dalam dunia pencarian kerja tersebut dikemukakan oleh Prof.A.Chotib Qudwain, mantan rektor IAIN Sultan Toha Jambi, beliau ikut merasa kecewa alumni IAIN yang sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang mereka. Pada kenyataannya alumni IAIN hanya sebagian kecil saja yang bisa diserap

oleh lapangan pekerjaan, khususnya lowongan pekerjaan yang tersedia di lingkungan Kementerian Agama, seperti menjadi guru, penyuluh program KB melalui jalur agama, hakim agama, dan tenaga kependidikan lain di lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh kementerian agama. Menteri Agama juga memberikan kritikan yang tajam terhadap IAIN, yang dianggap lemah dalam bahasa asing, lemah metodologi, dan lemah dalam mental ilmu.

Sesungguhnya sumber kekuatan dan sekaligus sumber kelemahan IAIN berdampak luas terletak pada perkembangan kuantitas yang sulit dikendalikan. Segi positif dari penyebaran IAIN yaitu:

1. Memberikan akses bagi generasi muda Islam untuk berkesempatan mengikuti pendidikan tinggi.
2. Memberi corak bagi masyarakat sebagai masyarakat madani dan bercorak Islam.
3. Mendorong kegiatan dakwah dalam masyarakat sekitar.
4. Membuka kesempatan bagi guru-guru dan pegawai negeri untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi serta standar pendidikan yang dituntut bagi suatu pekerjaan misalnya seorang guru di Madrasah

Tsanawiyah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, harus sudah sarjana.

Kelemahan dari perkembangan IAIN secara kuantitas yang demikian pesat sehingga tak terkontrol adalah

1. Sulit memenuhi biaya pembangunan sarana dan prasarana dan fasilitas pendidikan yang memadai
2. Sulit memenuhi tenaga kependidikan baik kuantitas maupun kualitas.
3. Sulit meningkatkan kemampuan dan kualitas tenaga dosen melalui program diploma atau non diploma karena keterbatasan biaya atau beasiswa terlebih bagi IAIN /STAIN
4. Dan paling krusial, dan berdampak luas terhadap kehidupan bernegara, adalah bahwa dengan jumlah kelembagaan yang tak terkontrol dengan kualitas yang substandar, IAIN terus mencetak tenaga terdidik yang secara akumulatif, semakin mempertinggi angka pengangguran.

Diantara alasan enam pemimpin UIN sekarang untuk memperjuangkan IAIN menjadi UIN adalah :

1. Dengan berubahnya status institut menjadi Universitas, mereka dapat mengembangkan program studi dan fakultas mereka dapat mengembangkan program studi dan fakultas non agama atau fakultas umum yang memungkinkan para

lulusan IAIN/UIN memperoleh akses yang lebih luas dalam mencari lowongan pekerjaan.

2. Untuk mengintegrasikan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, yang selama ini bersifat dikotomik dengan implikasinya yang tidak diinginkan.

Pengelompokan secara dikotomik antara ilmu yang diakui secara universal ada tiga macam, yaitu ilmu- ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu sosial dan ilmu ilmu humaniora. Disisi lain umat Islam mengembangkan ilmu agama Islam dengan cabang-cabangnya ilmu ushuluddin, ilmu syariah, ilmu tarbiyah, ilmu da'wah dan ilmu adab.

Dengan adanya kedua jenis ilmu tersebut maka terjadilah dikotomi ilmu dan agama. Pengelompokan secara dikotomik seperti itu berdampak luas dan pada akhirnya disadari oleh umat Islam bahwa mereka tertinggal dari umat lainnya. Perubahan IAIN ke UIN menandakan sebuah proses kesadaran yang lebih maju. Selama ini IAIN dianggap kampus yang memproduksi guru-guru agama baru, pengganti imam masjid, takmir, dan pengisi acara pengajian. Stigma ini tersepsi ketika alumni IAIN tidak berkembang karena ijazah yang dihasilkan adalah tidak memiliki standar yang diminta oleh pasar. Kita tidak bisa pungkiri bahwa,

keinginan di setiap kelulusan adalah orientasi mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang layak.

Pembentukan UIN merupakan bagian dari usaha mengintegrasikan beragam keilmuan untuk *mengeliminasi* dikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Hal ini dianggap perlu dalam usaha untuk memberikan dasar etika Islam demi pengembangan ilmu dan teknologi dan pada saat yang bersamaan juga berusaha mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam secara profesional di dalam kehidupan sosial. Perubahan IAIN menjadi UIN merupakan hasil dan usaha para sarjana Muslim yang lama dan melelahkan dimulai dari adanya Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) dari tahun 1957-1960. Kemudian pada tahun 1960-1963 berubah menjadi salah satu bagian dari fakultas di IAIN Yogyakarta. Akhirnya IAIN Syarif Hidayatullah (yang dimulai tahun 1963) berubah menjadi UIN dengan adanya Keppres No. 31 tahun 2002.

Perkembangan dunia pendidikan tinggi Islam dengan perubahan beberapa IAIN menjadi UIN, juga dibukanya prodi-prodi umum di IAIN, memunculkan harapan baru bagi munculnya alternatif paradigmatik pengembangan ilmu sosial di Indonesia.

Wacana besar integrasi agama dan ilmu pengetahuan segera muncul sebagai tema sentral pengembangan ilmu sosial di IAIN/UIN. Ilmu sosial yang selama ini terlanjur dikembangkan dengan asumsi kuat terpisahnya wilayah agama dan ilmu (diferensiasi), tentu tidak dapat menjawab kebutuhan kita atas paradigma keilmuan yang integratif. Disisi lain, gagasan semacam paradigma Islamisasi ilmu sosial juga masih menyisakan banyak persoalan pelik yang justru dapat menghambat perkembangan ilmu sosial. Oleh karena itu, maka dibutuhkan suatu paradigma lain yang lebih menjanjikan untuk mengatasi persoalan ini.

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu sosial yang begitu pesat, mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kesadaran manusia tentang fenomena agama. Agama untuk era sekarang tidak lagi dapat didekati dan dipahami hanya lewat pendekatan *teologis-normatif* semata-mata. Tetapi lebih dari itu. Penggeseran paradigma pemahaman agama mengarah pada keterbukaan dan transparan dalam pergaulan di dunia. Ada ketakutan bagi sebagian individu, kelompok, perubahan UIN sebuah ajang *sekularisme* terhadap fakultas agama,

mungkin mereka mempunyai alasan tersendiri. Akan tetapi, bagi penulis sendiri, tidaklah kuat, karena perubahan ini sebuah dilema atas agama dalam menghadapi persoalan sosial. Kalau kita boleh mengutip penjelasan yang diutarakan oleh al-Afghani, perubahan sebuah keharusan untuk keterbukaan, untuk menerima apa yang disuguhkan oleh modernitas Barat. Tujuan utama bukan meniru, tetapi menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Barat serta mencapai hukum perbedaan (*diversity law*), tetapi tetap pada lingkaran “kembali pada Al-Qur’an dan Sunnah”. Masyarakat modern, paradigma ilmu pengetahuan yang objektif dibangun oleh metodologi berdasarkan paradigma empiris dan nyata. Sedangkan agama sebagai hal-hal subjektif yang mengungkapkan perasaan dan emosional dan penilaian moral.

Keduanya memiliki peran masing-masing, akan tetapi yang paling penting adalah keduanya tidak boleh dicampurkan. Kenyataan yang objektif dilihat dari ilmu pengetahuan, sedangkan tasawuf, emosional, dan nilai moral menjadi bidang budaya dan agama. Keduanya agar memiliki arti penting dalam kehidupan adalah dengan mendialogkannya, agar terdapat keserasian dalam mengelola *kosmos* dan *kosmis* ini.

Penutup

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapatlah diketahui bahwasanya latarbelakang didirikannya PTAIN ialah Perhatian umat Islam terhadap pendidikan agama Islam semakin tumbuh ketika mengetahui bahwasannya Belanda datang ke Indonesia dengan tujuan *gospel*, dan juga dalam rangka memenuhi kebutuhan guru agama Islam di Indonesia.

Sekolah Tinggi Islam (STI) didirikan dan dibuka secara resmi pada tanggal 8 Juli 1945. Lalu pada tanggal 10 Maret 1948 STI dirubah menjadi Universitas Islam Indonesia dengan empat fakultas yaitu: Fak. Agama, Fak. Hukum, Fak. Ekonomi dan Fak. Pendidikan. Kemudian PTAIN didirikan di Yogyakarta pada bulan september 1951 yang berdasarkan pada peraturan pemerintah No. 34 Tahun 1950, yang ditanda tangani oleh Presiden RI.

Sejak pertama didirikan hingga saat ini Sekolah Tinggi Islam telah mengalami banyak perubahan dan juga perkembangan, yang mana perkembangan ini menjadikan Sekolah Tinggi Islam atau Perguruan Tinggi Islam menjadi lebih baik dan mendapat tempat di dalam hati masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, jumlah Perguruan Tinggi Islam diseluruh

Indonesia sangat banyak. Ada yang berbentuk Sekolah Tinggi Islam Tarbiyah (STIT), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), UIN (Universitas Islam Negeri) dan juga sekolah tinggi swasta.

Dalam sejarah perkembangannya yang begitu panjang PTAI kemudian mendapat ruang gerak yang luas sehingga mahasiswa dan alumninya memiliki nilai plus, karena otoritas keagamaan yang ada ditangannya bisa dibumikan dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami oleh publik secara luas, sehingga mahasiswa dan alumni PTAI bisa menjadi pengamat politik, politisi, wartawan cetak dan elektronik, aktivis LSM, bankir, advokat dan lain sebagainya.

Perkembangan dunia pendidikan tinggi Islam dengan perubahan beberapa IAIN menjadi UIN, juga dibukanya prodi-prodi umum di IAIN, memunculkan harapan baru bagi munculnya alternatif paradigmatis pengembangan ilmu sosial di Indonesia. Wacana besar integrasi agama dan ilmu pengetahuan segera muncul sebagai tema sentral pengembangan ilmu sosial di IAIN/UIN.

Daftar Pustaka

- A.Malik Fadjar et. Al., *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Dirjen Binbaga Islam, 1999).
- D.A. Tisna Amijaya, *Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1976-1985* (Jakarta: Dirjen Dikti, 1976).
- Dhofier, Z. (1982). *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.
- IAIN Jakarta, *Proposal Pembentukan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah* (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1998).
- Task Force Pendidikan Tinggi, *Implementasi Paradigma Baru di Pendidikan Tinggi*, (Jakarta: Dirjen Dikti, 1999).
- UNESCO, *Higher Education in the Twenty-First Century : Vision and Action* (Paris: UNESCO, 1998).
- <http://hanifmahfuds.wordpress.com/2012/02/08/ide-perubahan-iain-menjadi-uin-jakarta-dari-harun-nasution-hingga-azyumardi-azra/http://kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=151614> Kamis, 18 Juli 2013